

ADAPTASI KELOMPOK ETNIS TIONGHOA PALEMBANG PADA MASA DEPRESI EKONOMI 1930AN

Huddy Husin, M.I. Djoko Marihandono

Department of History, Faculty of Humanities, Universitas Indonesia

hudi0212@gmail.com, djoko_marihandono@yahoo.com

Abstrak:

The Chinese ethnic group as one of the social groups in Palembang, got a fairly good position when the Dutch East Indies colonial government came to power in the Palembang area. Even during the economic depression that hit the Dutch East Indies in general and particularly in the Palembang area, the Chinese ethnic group was able to endure and adapt to the changes that occurred. This historical study aims to understand the adaptation of the Palembang Chinese ethnic group during the economic depression period of the 1930s. The writing of this article uses historical methods obtained from the National Archives collection (ANRI), including the Regeerings-Almanac voor Nederlandsche-Indie bundle (1917 and 1920), the Staatsblad van Nederlansch Indie archive collection (1892, 1906 and 1918), Indisch Verslag archive (1931-1941) and the Colonial Verslag archive collection (1905-1930). The writing of this article also uses secondary sources obtained through the National Library in the form of Palembang local newspapers. Another secondary source in writing this article was obtained through the University of Indonesia library in the form of a book as a supporting work. In this article, the structuration approach described by Christopher Lloyd is used, and the Agency theory described by Anthony Giddens. This paper departs from the opinion that historical facts and value systems (socio-cultural and economic capital) owned by the Palembang Chinese ethnic group greatly influence the behavior of the Chinese ethnic in facing difficult times.

Keyword: *Etnis Tionghoa, Palembang, Depresi Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Kota Palembang adalah salah satu kota tepian air yang cukup terkenal di sepanjang wilayah pantai timur Sumatra. Sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya hingga periode awal kebangkitan Kesultanan Palembang, kota Palembang telah diberitakan sebagai wilayah perdagangan yang memiliki peranan dalam kegiatan perdagangan internasional. Kota Palembang yang juga merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang, menjadi mata rantai utama kegiatan perdagangan internasional melalui

keberadaan perdagangan lada, kopi, karet dan timah.

Kegiatan perdagangan tersebut (lada, kopi, karet dan timah), pada perkembangannya juga turut memberikan konsekuensi berupa perputaran kapital dan peningkatan kehidupan sosial di wilayah kota Palembang. Kota Palembang sebagai kota tepian air (sungai), dan bertumpu pada kegiatan perdagangan hingga awal abad ke-20, telah menjelma menjadi sebuah kota multietnis. Berdasarkan sumber, penduduk di kota Palembang pada tahun 1900 mencapai angka

667.526 orang, dengan komposisi : bumiputra 657.737 orang, Eropa 542 orang, Tionghoa 6.915 orang dan Timur Asing lainnya 188 orang.

Peningkatan jumlah penduduk etnis Tionghoa sendiri mengalami peningkatan yang cukup besar hingga tahun 1930, jumlah penduduk etnis Tionghoa mencapai angka 26.066 orang. Bertambahnya jumlah penduduk etnis Tionghoa menunjukkan bahwa etnis Tionghoa yang umumnya adalah kelompok pedagang, memiliki peranan dan pengaruh yang cukup luas terhadap aktivitas perdagangan di kota Palembang (*Indische Verslag* 1931: 13).

Kelompok etnis Tionghoa Palembang merupakan kelompok pedagang yang umumnya mengambil posisi sebagai pedagang eceran hingga pedagang besar yang mengelola kegiatan ekspor. Keberadaan dan eksistensi mereka dalam lapangan ekonomi di kota Palembang, tidak terlepas dari hubungan mereka dengan pemerintah kolonial di Palembang. Sejak keruntuhan Kesultanan Palembang, pemerintah kolonial di Palembang, memberikan kesempatan kepada kelompok etnis Tionghoa Palembang untuk menjadi pedagang perantara (*middle man*), antara penduduk bumiputra dengan pemerintahan kolonial di Palembang.

Pada saat depresi ekonomi menerjang kehidupan ekonomi di Hindia-Belanda, kehidupan ekonomi kelompok etnis Tionghoa Palembang juga tidak luput terkena imbasnya. Kegiatan perdagangan yang dikelola oleh kelompok etnis Tionghoa mengalami kelesuan dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pedagang dan pengusaha dari kelompok etnis Tionghoa Palembang. Para pedagang dan pengusaha kelompok etnis Tionghoa Palembang yang berkecimpung dalam sektor perkebunan

dan transportasi, merupakan sektor yang terkena imbas cukup besar.

Mengingat depresi ekonomi tahun 1930-an melanda hampir diseluruh sentra kegiatan ekonomi di Hindia-Belanda, maka tulisan ini hendak memberikan deskripsi mengenai prosesusual dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih terbatas di Palembang. Sementara itu fokus utama dalam pembahasan tulisan ini akan ditekankan kepada bagaimana adaptasi kelompok etnis Tionghoa pada masa depresi ekonomi, dan respon yang dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa dalam menghadapi dampak depresi ekonomi tahun 1930-an di wilayah Palembang.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang memuat prosedur atau tahapan sebagai berikut : Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi (Gottschalk, 1985:57). Heuristik sebagai langkah awal untuk mencari, mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber Sejarah. Langkah ini dilakukan oleh penulis kedalam upaya pencarian sumber yang berasal dari lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan proses penulisan artikel ini. Penulis melakukan proses heuristik di beberapa tempat, yakni : Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

Studi sejarah masa kolonial ini menggunakan sumber primer yang diperoleh dari koleksi Arsip Nasional (ANRI), diantaranya adalah bundel *Staatsblad van Nederlansch Indie* (tahun 1892, 1906 dan 1918), koleksi arsip *Indisch Veslag* (1931-1941) dan koleksi arsip *Kolonial Verslag* (Tahun 1905-1930). Penulisan artikel ini juga menggunakan sumber skunder yang di

dapat melalui Perpustakaan Nasional dalam bentuk Kumpulan arsip *Indische Pers Overzicht* (IPO) dan Surat Kabar lokal Palembang. Surat kabar lokal Palembang yang akan digunakan diantaranya adalah Han Po (terbitan 08 Juli 1930, 14 September 1933, dan 15 September 1933), surat kabar ini memberikan informasi yang khusus berkaitan dengan aktivitas etnis Tionghoa Palembang, dan secara umum membahas tentang kehidupan etnis tionghoa. Surat kabar tersebut, memberikan informasi tentang kehidupan masyarakat Palembang secara umum. Juli 1931), *Trajoe Melajoe* (24 Agustus 1926) lainnya adalah *Pertja Selatan*.

PEMBAHASAN

A. Kelompok Etnis Tionghoa dan Perkembangan Ekonomi Kota Palembang Akhir Abad ke-19

Kehadiran dan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, menurut Purcell kedatangan kelompok etnis Tionghoa terbagi atas tiga gelombang. Gelombang pertama yakni pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, kedua pada masa perdagangan jarak jauh (antara pedagang Asia dan Eropa), dan gelombang ketiga pada masa kolonialisasi Belanda. Gelombang kehadiran kelompok etnis Tionghoa yang terjadi dalam tiga tahap tersebut menurut Charles Coppel memiliki motif yang sama, yakni dalam kerangka ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di Nusantara (Coppel, 1976: 5).

Keberadaan kelompok etnis Tionghoa di Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya, dapat diketahui melalui bukti arkeologis keberadaan kampung-kampung kecil yang menjadi

tempat bermukim etnis Tionghoa. Pola pemukiman kelompok etnis Tionghoa yang berada di wilayah Palembang memiliki ciri yang khas, dimana menurut Charles Coppel keberadaan pemukiman tempat tinggal etnis Tionghoa mengikuti jalur tepian sungai Musi dan lairan sungai lainnya (Purwanti, 1999: 46). Kelompok etnis Tionghoa yang berada di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya hingga abad ke-15, umumnya di dominasi oleh suku bangsa Hokkien dan Hakka yang berasal dari propinsi Fukien dan Kwantung (Coppel, 1976: 5).

Berdirinya Kesultanan Palembang pada tahun 1553 memberikan perubahan yang cukup besar bagi kelompok etnis Tionghoa, yang telah menetap di wilayah Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya (Wolters, 2017: 223-224). Kesultanan Palembang membuat kebijakan pelarangan bagi orang-orang Tionghoa untuk membangun rumah di wilayah daratan, etnis

Tionghoa hanya diizinkan membangun tempat tinggal dengan menggunakan rumah rakit yang mengapung di aliran sungai (Ari, 2002: 6; Sevenhoven, 2015: 16). Perubahan kebijakan mengenai pemukiman penduduk kelompok etnis Tionghoa pada masa Kesultanan Palembang tersebut, dilakukan untuk memudahkan pihak Kesultanan Palembang dalam melakukan kontrol terhadap etnis Tionghoa di Palembang.

Pasca keruntuhan Kesultanan Palembang di tahun 1825 dan kemudian digantikan oleh perwakilan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Palembang, keberadaan kelompok etnis Tionghoa Palembang perlahan mulai nampak. Kebijakan penataan pemukiman penduduk yang sesuai dengan latar belakang etnis menjadi awal pembentukan identitas etnis

Tionghoa di ruang daratan kota Palembang.

Kebijakan pembentukan tata pemukiman penduduk di Palembang yang hendak menegaskan batas tegas tentang kota dan desa, pada perkembangannya memunculkan wilayah kota menjadi tempat tinggal orang-orang Eropa yang berdampingan dengan penduduk Tionghoa. Sementara itu desa menjadi wilayah pemukiman penduduk bumiputra serta sebagian orang-orang yang berasal dari Timur Tengah (*Staatsblad* No. 814 tahun 1919; *Regeringsreglement* 1854, Pasal 71).

Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di kota Palembang, mulai melakukan penataan pemukiman penduduk. dengan menempatkan kelompok etnis Tionghoa dalam satu wilayah tempat tinggal sendiri, yang lebih dikenal dengan sebutan *Chinezen Wijkenstelse* (*Staatblad van Nerdelansch Indie* No. 37 Tahun 1835). Pembentukan *Wijkenstelsel* oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mengharuskan kelompok etnis Tionghoa Palembang menetap dan bermukim di wilayah yang sudah ditentukan yakni Ulu-7, Ulu-9 dan Ulu-10 9 (*Regeerings-Almanak Voor Nederlansch-Indie*, 1917: 350). Kebijakan *Wijkenstelsel* tersebut diterapkan untuk melengkapi pelaksanaan kebijakan *Passenstelsel*, peraturan bagi kelompok etnis Tionghoa yang hendak melakukan perjalanan (*Staatblad van Netherdelansch Indie* No. 25 Tahun 1816; Mona Lohanda, 2005; 62).

Dalam menjaga stabilitas sosial dari penduduk Tionghoa di Palembang pemerintahan kolonial menunjuk beberapa perwakilan etnis Tionghoa, untuk menjadi pemimpin bagi warga Tionghoa (*Hoofd de Chinezen*). Para pemimpin warga Tionghoa di

Palembang, diberikan gelar/ pangkat seperti *Majoor de Chinezen*, *Kapiten de Chinezen* dan *Luihtnan de Chinezen*. Para pemimpin warga Tionghoa Palembang tersebut diberikan tugas utama yaitu mengurus tugas administrasi bagi warganya, dan seiring meningkatnya kepercayaan pemerintah kolonial para pemimpin tersebut mendapat tugas untuk menarik pajak.

Pada praktik kehidupan sehari-hari para pemimpin Tionghoa Palembang bertugas untuk mengorganisasi masyarakat etnis Tionghoa, dalam kegiatan ekonomis di wilayah Palembang. Kelompok etnis tionghoa yang umumnya bertindak sebagai pedagang perantara (*middle man*), merupakan elemen yang cukup vital dalam menghubungkan masyarakat bumiputera dengan kegiatan ekonomi milik pemerintah kolonial (Carey, 2008: x; Zed, 2003: 99). Pada saat permasalahan muncul dalam kegiatan ekonomi di wilayah Palembang dan berkaitan dengan etnis Tionghoa, maka pertama kali permasalahan tersebut akan ditangani oleh Letnan China.

Seiring dengan ditetapkannya wilayah Palembang sebagai Karesidenan tahun 1906, kehadiran para pegawai pemerintahan Eropa dan pengusaha Eropa semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk Eropa terbanyak datang dari para pengusaha Eropa, kehadiran pengusaha-pengusaha Eropa di picu oleh pemberian kemudahan konsensi tanah *erfpacth* untuk membuka lahan perkebunan (Zed, 2003: 69). Pada tahun 1916 perkembangan industri perkebunan di wilayah Palembang terus meningkat, khususnya untuk pembukaan area perkebunan teh dan karet di dataran tinggi daerah Besemah. Masuknya 51 perusahaan perkebunan milik pengusaha Eropa di wilayah Palembang pada awal tahun 1906, menandai masuknya

investasi perkebunan dari Eropa lainnya yakni Swiss dan Jerman (Wellan, 1932: 305).

Melihat peningkatan usaha perkebunan di wilayah Palembang, pemerintah kolonial di Batavia menugaskan NHM (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) untuk mengambil posisi sebagai pemberi modal (bank) bagi pegusaha Eropa dan Tionghoa di Palembang. Peningkatan aktivitas industri para pegusaha Eropa di wilayah Palembang semakin meningkat, mana kala ditemukan area pertambangan minyak bumi, gas alam dan batu bara di sekitar wilayah utara kota Palembang.

Kegiatan pertambangan di Palembang dimulai sejak tahun 1916, dimana pemerintah kolonial memberikan konsensi pada lahan seluas 126.661 hektar di wilayah Lematang. Dua perusahaan tambang yang cukup penting dan memegang konsensi terbesar dalam usaha pertambangan minyak bumi dan batubara di Palembang, ialah *Royal Dutch Shell* dan *Standard Oil Coperatiton* (Boomgaard, 1988: 142)

Kegiatan ekonomi di wilayah Palembang dalam sektor ekonomi makro (industri), secara umum memang dikuasai oleh para pengusaha yang berasal dari Eropa. Sektor ekonomi mikro (kecil) di wilayah Palembang menjadi milik para pedagang etnis Tionghoa dan Arab. Posisi ekonomi etnis Arab di wilayah Palembang sejatinya berbanding terbalik pada masa Kesultanan Palembang, dengan masa penguasaa kolonial di Palembang. Orang-orang Arab di Palembang pada masa kesultanan, memiliki posisi ekonomi yang cukup kuat dibandingkan Depresi ekonomi merupakan sebuah fenomena dalam arah perkembangan ekonomi dunia di awal abad ke-20, sebagai bentuk produksi yang

oleh etnis Tionghoa Palembang. Pada masa Kesultanan Palembang, orang-orang Arab memiliki usaha sebagai pedagang kain, pengolahan gula dan usaha transportasi pengangkutan barang di sungai Musi. Kemudahan yang diberikan oleh pihak Kesultanan Palembang kepada orang-orang Arab yang cukup penting adalah, izin mendirikan pemukiman di wilayah daratan Palembang dan izin mengakses perdagangan hingga wilayah pedalaman (Sevenhoven, 2015: 57).

Sejak masa pemerintah kolonial menguasai seluruh wilayah Palembang pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mengubah kebijakan kepada orang-orang Arab di Palembang. Orang-orang Arab tidak lagi diperkenankan untuk mengakses wilayah pedalaman, meskipun untuk mengadakan kegiatan perdagangan (Rochmiatun, 2011; 106). Kebijakan untuk tidak memberikan akses kepada orang-orang Arab untuk masuk kepedalaman, diambil oleh pemerintah kolonial untuk menekan pengaruh perlawanan penduduk pedalaman Palembang melalui sentimen keagamaan. Kebijakan kontrol yang cukup ketat dari pemerintah kolonial terhadap etnis Arab di Palembang, membuat para pedagang Arab tidak lagi memiliki pasokan barang-barang komoditi dari pedalaman. Sebagai contoh adalah memudarnya pengaruh orang-orang Arab dalam sektor produksi gula di Palembang, karena produksi gula di Palembang di dapat melalui suplai tanaman aren dari pedalaman (Zed, 2003: 101).

B. Kota Palembang Pada Masa Depresi Ekonomi

berlebihan dalam satu atau lebih sektor kegiatan ekonomi. Sumitro menjelaskan bahwa arah perkembangan kontraksi ekonomi di awal abad ke-20, terjadi

dalam kegiatan ekonomi di Amerika Serikat. Over production dalam kegiatan ekonomi di Amerika Serikat terjadi dalam lini produksi industri otomotif yang kemudian menjalar ke wilayah bisnis properti (real estate). Produksi yang berlebihan dalam bidang industri dan properti tersebut mengakibatkan jatuhnya pasar saham, dan mendorong pula jatuhnya nilai ekspor negara-negara maju Eropa dan Amerika. Keadaan tersebut memberikan pengaruh kepada negara-negara di dunia ketiga, sebagai produsen atas bahan mentah. Jatuhnya produksi dalam dunia industri negara maju, memberikan imbas terhadap produksi dan perdagangan di negara-negara produsen bahan mentah dalam bentuk hilangnya transaksi dagang bahan mentah antara negara maju dengan negara produsen bahan mentah. Situasi tersebut, memberikan pengaruh terhadap hilangnya kesempatan perputaran modal dari negara-negara maju kedalam dunia ekonomi negara-negara produsen bahan mentah (Wahid, 2009: 98).

Hindia-Belanda sebagai satu dari wilayah-wilayah di Asia yang menjadi produsen dan penyuplai bahan mentah bagi industri negara-negara maju, ikut mengalami dan menghadapi situasi kelesuan ekonomi di tahun 1930an tersebut. Kegiatan ekonomi seperti perkebunan dan pertambangan merupakan dua lini ekonomi Hindia-Belanda yang mengalami dampak terbesar akibat depresi ekonomi di tahun 1930an tersebut. Ekspor hasil tanaman perkebunan dan pertambangan menurun, dan mengakibatkan keuntungan perusahaan pengelola menurun dan upah buruh menurun secara drastis. Situasi penurunan dalam konteks pendapatan upah buruh di Hindia-Belanda, tidak pelak memberikan dampak besar kepada

tingkat daya beli dan kesejahteraan para penduduk di Hindia-Belanda.

Mengenai keadaan pada masa depresi ekonomi di Hindia Belanda, Sumitro menjelaskan bahwa situasi semakin terpuruk manakala beberapa wilayah di Hindia-Belanda mengalami mismeasure yang panjang. Faktor iklim dan cuaca musim kemarau ini membuat penurunan pula dalam produksi sektor pertanian masyarakat di Hindia-Belanda, yang tidak lain adalah tulang punggung utama masyarakat bumiputra di Hindia-Belanda (*Kolonial Verslag*, 1930: 142). Jadi pada masa depresi ekonomi di tahun 1930an, masyarakat Hindia-Belanda mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan oleh dua faktor yakni eksternal dan internal.

Situasi keterpurukan ekonomi di Hindia-Belanda secara umum, juga merambah ke wilayah tingkat mikro seperti wilayah Palembang. Keadaan ekonomi yang menurun sangat berbanding terbalik dengan situasi ekonomi di Palembang pada awal tahun 1900 hingga pertengahan 1920an. Palembang sebagai wilayah penghasil tanaman karet, timah dan pertambangan mengalami penurunan dalam kegiatan produksi dan ekspor (*Kolonial Verslag*, 1930: 15). Dalam laporan *Kolonial Verslag* dijelaskan bahwa dalam konteks ekonomi penanaman karet, tidak hanya produksi karet saja yang mengalami penurunan akan tetapi juga terjadi penurunan angka upah buruh dalam perkebunan karet. Produksi karet yang menurun, karena suplai terhadap permintaan karet dalam pasar internasional, memberikan dampak terhadap penurunan jumlah ekspor tanaman karet dari Hindia-Belanda (*Kolonial Verslag*, 1930: 137).

Penurunan ekonomi yang mendera wilayah Palembang pada periode tahun 1930an, pada umumnya menghantam

perusahaan-perusahaan perkebunan yang berasal dari Eropa. Sebagai contoh ialah perusahaan perkebunan karet dan kopi milik pengusaha Eropa, yang terpasak harus ditutup karena dampak depresi ekonomi. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang tetap dibuka, umumnya menggunakan strategi penghematan dalam bentuk mengubah status tenaga kerja dari buruh kontrak menjadi buruh upah lepas. Perusahaan eksportir kopi yang berasal dari Perancis yakni *Syndicate des Cafe's de Havre*, tidak lagi membeli hasil penen kopi dari penduduk secara keseluruhan (Zed, 2003: 116). Perusahaan milik etnis Tionghoa yang bergelut dalam penjualan karet, juga mengalami nasib serupa, bahkan menyatakan pailit dan ditutup. Sebagai contoh ialah perusahaan karet Kian Gwan dan Lee yang ditutup pada tahun 1932 (Purwanto, 1992: 284).

Sektor usaha lainnya yang terkena imbas dari depresi ekonomi di Palembang adalah perusahaan pelayaran milik pengusaha Belanda. Kapal-kapal milik perusahaan *Rooterdam lloyds* di Palembang, terpaksa mengurangi beberapa rute pelayaran mereka yang menyusuri pantai barat Sumatera (Zed, 2003: 116). Perusahaan pelayaran milik pemerintah (KPM) yang mengambil rute pelayaran antara Palembang dengan Batavia di pulau Jawa juga terkena imbasnya. Sejak depresi ekonomi mendera wilayah Palembang, tidak ada lagi pelayaran yang membawa barang-barang niaga dari Palembang ke Batavia (Santun, 2010: 89).

Situasi kemunduran ekonomi pada periode tahun 1930an di kota Palembang, tidak hanya membuat perusahaan-perusahaan di Palembang merugi, akan tetapi juga membuat kaum buruh di Palembang berada dalam situasi yang sangat sulit. Masyarakat bumiputra di bagian pedalaman juga

mengalami kemunduran, barang-barang hasil hutan dan perkebunan rakyat milik mereka, juga tidak mampu memberikan stimulus (dorongan) bagi kehidupan mereka. Pedagang-pedagang Tionghoa yang sebelum depresi ekonomi kerap membeli hasil produksi mereka, akan tetapi setelah masa depresi ekonomi jarang sekali datang untuk membeli hasil pertanian dan hasil hutan yang mereka produksi (Santun, 2010: 79). Produksi hasil hutan dan pertanian yang berasal dari wilayah pedalaman Palembang, mengalami penurunan eksport di bawah angka sepuluh juta gulden. Keadaan nilai eksport yang menurun tersebut, bahkan terus berlagsung hingga selepas tahun 1930 (*Han Po*, 15 September 1933; Wellan, 1932: 224).

B. Respon Kelompok Etnis Tionghoa Terhadap Depresi Ekonomi

Kelompok etnis Tionghoa Palembang adalah golongan masyarakat yang menempatkan keberadaannya dalam posisi yang cukup strategis. Berdirinya kekuasaan kolonial Eropa di wilayah Palembang, telah mengantarkan mereka kepada posisi sebagai kelompok perantara dalam kegiatan ekonomi di Palembang. Positioning sebagai kelompok perantara memiliki konsekuensi, yakni sebagai penaga keseimbangan distribusi ekonomi dari desa ke kota, akan tetapi juga memiliki kerentanan terhadap kegucangan dalam model ekonomi kolonial (Wahid, 2009: 130).

Pada masa depresi ekonomi yang melanda Hindia-Belanda pada periode tahun 1930an, memberikan dampak kepada kegiatan ekonomi dalam setiap level tingkatan ekonomi (makro dan mikro). Kelompok etnis Tionghoa yang berada dalam level tingkat ekonomi menengah di Hindia-Belanda juga mengalami dan terkena dampak depresi

ekonomi tersebut. Para pengusaha etnis Tionghoa Palembang yang umumnya bertindak sebagai perdagangan karet serta usaha transportasi pelayaran, dinilai sebagai jenis usaha yang mengalami dampak dari depresi ekonomi di tahun 1930an. Sebagai konsekuensinya perusahaan-perusahaan milik pengusaha Tionghoa tersebut melakukan rasionalisasi berupa penghematan operasional usaha mereka. Wujud dari upaya penghematan tersebut adalah, pengurangan jumlah tenaga kerja dan penurunan upah bagi pekerja mereka (Wahid, 2009: 131).

Fenomena pengurangan jumlah tenaga kerja serta penurunan upah tenaga kerja, sejatinya merupakan pukulan yang cukup besar bagi kelas profesionalisme dari angkatan kerja muda Tionghoa (Wahid, 2009: 131). Angkatan kerja muda Tionghoa adalah golongan pelajar Tionghoa yang mendapatkan kesempatan pendidikan yang dibuka oleh pemerintah kolonial di Palembang, mereka memiliki keahlian dalam bidang administrasi dan sektor jasa lainnya (Ingleson, 1988: 296). Hal yang cukup memperhatikan adalah ketiadaan data-data mengenai dampak depresi ekonomi terhadap angkatan kerja muda dari etnis Tionghoa di Palembang.

Situasi penurunan ekonomi di wilayah Palembang, sejatinya tidak sama dalam konteks dampak seperti yang terjadi di wilayah pulau Jawa. Pada masa depresi ekonomi di pulau Jawa, cukup banyak pengusaha etnis Tionghoa yang terintegrasi dengan kegiatan usaha perkebunan. Para pengusaha etnis Tionghoa di Jawa umumnya adalah penyewa tanah untuk kepentingan industri perkebunan tebu, sementara itu di wilayah Palembang kebijakan mengenai sewa tanah tidak dapat dilakukan secara progresif mengingat posisi para pemimpin

pasirah yang menjadi pemilik atas hak tanah di wilayah pedalaman (Santun, 2017: 61).

Pada masa depresi ekonomi di Palembang, keadaan ekonomi di kota dan desa (pedalaman) sangat berbeda. Masyarakat di wilayah Irian yang telah terintegrasi dengan ekonomi kolonial, tidak dapat menghindari dari dampak depresi ekonomi. Sementara itu posisi wilayah pedalaman tidak menghadapi situasi yang cukup serius, mengingat depresi ekonomi hanya menghantam perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa. Dalam situasi yang demikian kelompok pasirah mengambil alih proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Produksi kopi dan karet milik rakyat pasirah adalah jenis produksi yang mampu keluar dari situasi ekonomi yang menurun. Hal ini dapat terjadi karena usaha penanaman kopi dan karet milik rakyat tidak memerlukan modal yang cukup besar, modal utama hanya terletak pada tenaga kerja yang mereka lakukan sendiri.

Posisi kelompok etnis Tionghoa Palembang yang menjadi pedagang perantara mulai mengambil alih peran dari perusahaan-perusahaan Eropa, dengan berbekal jaringan dagang di bandar dagang Singapura para pedagang etnis Tionghoa mulai memanfaatkan situasi depresi ekonomi yang melanda perusahaan-perusahaan dari Eropa. Bambang Purwanto menjelaskan bahwa dalam kasus perdagangan karet, para pedagang Tionghoa yang bernaung dalam chinese remiller dan pedagang bumiputra bekerja sama untuk menjual hasil karet ke bandar dagang Singapura (Purwanto, 1992: 284). Siasat untuk dapat mempertahankan keberadaan diri oleh kelompok etnis Tionghoa Palembang, tidak terlepas dari sistem nilai yang dipercaya oleh etnis Tionghoa dalam bentuk ajaran tentang *Hopeng*,

yakni menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis (Lembaga Studi Realino, 1996: 51).

Pada masa depresi ekonomi di wilayah Palembang pada periode tahun 1930an, tidak seluruhnya kelompok etnis Tionghoa dapat menyelamatkan kegiatan usahanya. Maka dari itu kegiatan –kegiatan yang bersifat membantu (amal) secara sukarela dihidupkan oleh kelompok etnis Tionghoa. Kegiatan amal dan membantu antar anggota atau kelompok etnis Tionghoa, dijalankan oleh organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan*. Organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* yang berpusat di Batavia, dan memiliki cabang di Palembang ini menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat Tionghoa yang terkena dampak krisis (Joe Lan, 1940: 345).

PENUTUP

Kelompok etnis Tionghoa sebagai salah satu golongan sosial di Palembang, mendapatkan posisi yang cukup baik manakala pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai berkuasa di wilayah Palembang. Bahkan pada saat terjadi depresi ekonomi yang melanda Hindia-Belanda secara umum dan khususnya di wilayah Palembang, kelompok etnis Tionghoa mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Posisi sebagai pedagang perantara di satu sisi memberikan konsekuensi yang sejatinya menguntungkan bagi kelompok etnis Tionghoa Palembang. Pada saat perusahaan-perusahaan yang berasal dari Eropa menghadapi masa-masa sulit pada periode depresi ekonomi tahun 1930an, para pengusaha etnis Tionghoa mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan

penguasa bumiputra di pedalaman dalam konteks perdagangan.

Dikotomi antara wilayah Ulu dan Iliran sejatinya juga menguntungkan posisi kelompok etnis Tionghoa, karena wilayah Iliran yang mengalami dampak terberat dari depresi ekonomi justru wilayah Ulu yang memberikan kesempatan untuk mempertahankan eksistensi kelompok etnis Tionghoa sebagai perantara. Siasat untuk dapat mempertahankan keberadaan diri oleh kelompok etnis Tionghoa Palembang, tidak terlepas dari sistem nilai yang dipercaya oleh etnis Tionghoa dalam bentuk ajaran tentang *Hopeng*, yakni menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis.

Periode depresi ekonomi tahun 1930an sebagai salah satu episode sejarah Indonesia pada masa kolonial, merupakan satu bagian episode sejarah yang cukup penting. Tidak hanya menunjukkan bagaimana bangsa ini berupaya bertahan dan keluar dari situasi atau masa-masa sulit, akan tetapi juga menunjukkan bahwa masa-masa depresi ekonomi di tahun 1930an tidak dapat kita lihat secara general (umum) antara wilayah satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatblad van Nerdelansch Indie No. 37 Tahun 1835

Staatsblad van Nerdelansch Indie No. 814 tahun 1919;

Staatblad van Nerdelansch Indie No. 25 Tahun 1816

Regeringsreglement 1854, Pasal 71

Regeerings-Almanak Voor Nederlansch-Indie, 1917

Indische Verslag, 1931

Kolonial Verslag, 1930

Surat Kabar

Han Po, 15 September 1933

Artikel/ Jurnal

Lohanda, Mona. (2005). “*The Passen en Wijkenstelsel: Dutch Practice of Resstrictions policy on The Chinese*”, Jurnal Sejarah No. 12.

Ingleson, John. (1988). “*Urban Java During Depression*”, Kournal of Asian Studies 19 No. 2.

Purwanti, Retno. (1999). *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat China di Palembang*, Jurnal Arkeologi Siddhayarta, Volume 7.

Buku-Buku

Ari, Kemas. (2002). *Masyarakat Tionghoa Palembang : Tinjauan Sejarah Sosial 1823-1945*. FPS2B dan PSMTI. Palembang.

Boomgaard, Peter. “*Treacherous Cane : The Java Sugar Industry between 1914 and 1940*”, dalam B. Albert and A. Graves (ed). 1988. *The World Sugar Economy in War and Depression 1914-1940*. London : Roudledge.

Carey, Peter. (2008). *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Copel, Charles. (1976). *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta : Sinar Harapan.

Jo Lan, Nio. (1940). *Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwee Koan-Batavia 1900-1939*. Batavia : THHK.

Lembaga Studi Realino. (1996). *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius.

Purwanto, Bambang. 1992. *From Dusun To The Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra 1890-1940*. Disertation (University of London).

Rochmiatun, Endang. (2011). *Ulama Bebas dan Ulama Birokrat : Dinamika Gerakan Islam di Palembang 1825-1942*. Disertasi S-3 (Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia)

Santun, M. Dodi. (2010). *Venesia Dari Timur : Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Ombak

Sevenhoven, Van J.I. (2015). *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Yogyakarta: Ombak.

Wahid, Abdul. (2009). *Bertahan di Tengah Krisis : Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta : Ombak.

Wellan, J.W.J. (1932). *Zuid Sumatra: Economisch Overzicht*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.

Wolters O.W. (2017). *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad ke-III-VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Zed, Mestika. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.